

## **PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BENTENG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI**

**Putri Rozana<sup>1</sup>, Eka Agustina<sup>2</sup>, Safia Maulida<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jabal Ghafur, Pidie

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jabal Ghafur, Pidie

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jabal Ghafur, Pidie

\*Corresponding author: [rozanaputri847@gmail.com](mailto:rozanaputri847@gmail.com), [ekaunigha@gmail.com](mailto:ekaunigha@gmail.com), [safiamaulida6@gmail.com](mailto:safiamaulida6@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the use of village funds for community empowerment and analyze its impact on improving the economic welfare of the community in Gampong Benteng, Sigli City District, Pidie Regency. This research uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with 18 informants, and documentation. The results show that village funds have been used for empowerment programs such as skills training, support for micro-businesses, and public works projects. These programs have positively impacted family income, created job opportunities, and improved the quality of life of residents. However, challenges remain, including delayed disbursement, unequal distribution, and lack of ongoing training. The study concludes that village funds generally support community empowerment and economic welfare improvement but require better transparency and inclusiveness.*

**Keywords:** Village funds; Community empowerment; Economic welfare.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam kepada 18 informan yang terdiri dari perangkat desa dan warga penerima manfaat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa telah dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan menjahit, pengelolaan UMKM, kerajinan tangan, hingga program padat karya dan penguatan BUMG. Program tersebut telah memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan keluarga, pembukaan peluang usaha, serta peningkatan kualitas hidup warga. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, antara lain keterlambatan pencairan dana, distribusi manfaat program yang belum merata, dan minimnya pelatihan lanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa di Gampong Benteng secara umum telah mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, meskipun perlu perbaikan dalam hal pemerataan, transparansi, dan pelibatan aktif masyarakat.

**Kata kunci:** Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Ekonomi.

## **1. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi yang semakin berkembang ini, maka suatu negara dituntut untuk mampu merancang strategi pembangunan yang dapat berkelanjutan dalam memajukan bangsanya. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pasal 1 ayat 2 bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan nasional pada dasarnya ialah pembangunan Indonesia dan pembangunan masyarakat seutuhnya, pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam (Rindi, Tyas Arma, 2019;22). Pembangunan desa merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia, desa memegang peranan strategis dalam struktur pemerintahan karena mayoritas penduduk hidup dan bergantung pada sektor-sektor yang berkembang di pedesaan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha kecil menengah.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa adalah dana desa, yang dikucurkan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke seluruh desa di Indonesia. Menurut data Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2024, Dana desa telah mampu membiayai berbagai program pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan sosial di desa-desa seluruh Indonesia. Namun demikian, penerapan pemanfaatan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Secara nasional, Dana Desa mulai dikucurkan pada tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas desa untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program yang didanai melalui Dana Desa tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berbagai inisiatif seperti pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan kapasitas petani dan nelayan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta program padat karya telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan desa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa

pemanfaatan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, pembina, dan pendamping teknis bagi desa dalam merencanakan, melaksanakan, hingga menyebarkan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Permendagri dan Permendes PDTT yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan.

Desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan pembangunan nasional yang di mulai dari level terbawah demi tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui pemerataan pemberdayaan dan pembangunan Desa (Halim, & Adianto, 2021;88). Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat agar mampu mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dana desa diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Fenomena yang terjadi di desa Benteng menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Desa Benteng terletak di tengah kota, yang secara geografis menawarkan akses strategis terhadap fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Secara fisik, Desa Benteng tampak berkembang dan modern. Pada pengamatan awal menunjukkan bahwa sebahagian dari pada masyarakat desa tersebut adanya keterbatasan ekonomi. letaknya Benteng dengan kota dapat membuka peluang ekonomi, namun juga bisa menimbulkan ketimpangan apabila pemberdayaan desa masyarakat tidak dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah pemanfaatan dana desa di Desa Benteng mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata di tengah pengaruh urbanisasi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, dana desa seharusnya tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan potensi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana program-program pemberdayaan yang didanai dari dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Desa Benteng.

Fakta tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Maria Liliosa Coe Wea, dkk (2024), penelitiannya menemukan hasil yaitu Penggunaan dana desa di Desa Wolowea Timur telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat namun peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan masih belum signifikan akibat beberapa kendala yang dihadapi di Desa. Penelitian sebelumnya juga dikemukakan oleh Christian Kenny Alexander Wuisan dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2020) Hasil penelitian di Desa Kopeng menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih belum optimal karena masih berfokus pada bidang pembangunan, khususnya infrastruktur. Dari hasil penelitian tersebut penulis juga tertarik mengkaji mengenai manfaat dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat. hal

ini di karenakan letak desa Benteng di daerah perkotaan apakah terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat.

Slamet (2018:18) dana Desa menjadi alat rekayasa social ekonomi desa, agar desa dapat mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan terhadap pusat. alat strategis untuk melakukan rekayasa sosial dan ekonomi di tingkat desa. Melalui Dana Desa, pemerintah mendorong transformasi desa dari wilayah yang pasif dan tergantung pada bantuan pusat, menjadi entitas yang aktif, produktif, dan mandiri. Riyadi dan Bratakusumah (2020:45) Dana Desa adalah kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis masyarakat, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa). Dana Desa bukan sekadar transfer uang dari pusat ke desa, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun desa yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan nasional maupun global.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2019:11) Pemberian Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan publik desa
- b. Memajukan perekonomian desa
- c. Mengentaskan kemiskinan
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
- e. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah arah kebijakan atau pedoman utama dalam pemanfaatan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun, guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kemandirian desa. Prioritas ini disusun berdasarkan potensi, permasalahan, dan kebutuhan nyata di desa, serta bertujuan untuk mendukung program nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat fisik saja melainkan juga peningkatan sumber daya manusia yang berada di desa. Prioritas penggunaan dana desa tersebut diputuskan melalui musyawarah dusun, musyawarah gampong dan musrenbang gampong. Vinet & Zhedanov(2019:19)

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) (Edi Suharto, 2018: 57) Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Proses ini melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya, sehingga masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Putri antou dkk (2019; 133) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Masyarakat adalah kesatuan dari sejumlah individu yang kegiatannya saling membutuhkan, dan menempati suatu ruang atau wilayah tertentu. Masyarakat juga merupakan satu kelompok orang-orang yang memiliki ciri atau pekerjaan yang sama, atau tinggal pada suatu kawasan tertentu. Menurut Muhammad Bagus Setiadi (2022; 881) pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai suatu proses serta tujuan yang memuat suatu kelompok kegiatan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, maka proses pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang mempunyai kemampuan dan juga pengetahuan sebagai proses pemenuhan kebutuhan hidup individu, baik fisik, ekonomi serta social.

Tujuan akhir dalam pemberdayaan adalah untuk meningkatkan jiwa kemandirian terhadap warga masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dalam mencukupi kebutuhan. Menurut M.Totok dan Poerwoko Soebiato (2020: 16) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Instution*” Dengan melalui tindakan perbaikan kegiatan diharapkan dapat memperbaiki kelembagan pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan Usaha “*Better Business*” Dengan melakukan perbaikan pendidikan, kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang telah dilaksanakan.
3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*” Dengan adanya perbaikan usaha, diharapkan dapat memperbaiki sistem pendapatan keluarga dalam mencukupi kebutuhan.
4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*” Melalui perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan sekitar baik dari fisik maupun sosial. Kerusakan lingkungan terjadi akibat banyaknya angka kemiskinan.
5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*” Dengan melalui pendapatan serta lingkungan, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*” Perbaikan kehidupan masyarakat serta lingkungan diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang umum digunakan dalam kajian tentang pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk di Benteng, adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2018:96) Menurut Creswell, metode kualitatif studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap

oleh individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan studi kasus adalah sebuah strategi penelitian di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Dengan demikian, metode kualitatif studi kasus sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dana desa dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi di Benteng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang mana subjek penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, Sugiyono menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti (Sugiyono.2022: 140) karena subjek tersebut dianggap paling mengetahui, paling memahami, atau paling berpengalaman tentang sesuatu yang diteliti. sehingga subjek penelitian difokuskan pada pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Benteng. Subjek penelitian meliputi perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Dana Desa. Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas desa, kelompok masyarakat seperti pelaku UMKM, kelompok tani, serta individu warga yang menerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam studi ini.

Sumber data diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan pemberdayaan, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen desa seperti RPJMDes, RKPDDes, laporan realisasi Dana Desa, serta data statistik desa yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana Dana Desa dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Benteng.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung atau sistematis. data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian dari pada kegiatan pengamatan. observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari informan yang



bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara untuk memperoleh data pendukung, dimana pewawancara terikat dengan pedoman-pedoman yang telah dibuat terlebih dahulu untuk mewawancarai narasumber. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Sesuai dengan pengertiannya wawancara mendalam bersifat terbuka.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang telah ada sebelumnya. dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun gambar. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis maupun gambar yang terbtkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dimanfaatkan oleh peneliti dengan cara ditafsirkan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa undang-undang, foto, dan APBD Desa Benteng.

Menurut Sugiyono (2022:244) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis yang tepat adalah analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020:33).

Berikut tahapan teknik analisis data yang digunakan berdasarkan model interaktif:

#### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disaring dan disederhanakan. Di tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data yang tidak terkait dengan topik utama akan diabaikan, sehingga hanya informasi yang signifikan yang digunakan.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dikondensasi, informasi yang relevan akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, misalnya antara jenis program pemberdayaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Peneliti juga dapat menggunakan kategori atau tema yang muncul dari data untuk memperjelas hasil analisis.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada tahap ini, peneliti mulai menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Kesimpulan sementara akan diuji dan diverifikasi dengan data tambahan yang diperoleh selama

penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola penting terkait bagaimana Dana Desa berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Benteng. Verifikasi dilakukan terus-menerus hingga peneliti yakin bahwa kesimpulan yang ditarik akurat dan valid.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Gampong Benteng**

Desa Benteng terletak di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa ini berada di daerah pesisir atau pinggir pantai yang langsung menghadap ke Pantai Sigli. Desa Benteng berbatasan langsung dengan laut di sebelah utara. Di sebelah selatan, desa ini berbatasan dengan desa Tanjong Harapan, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Blang Paseh, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Pante Tengoh. Desa Benteng juga memiliki akses jalan yang cukup baik yang terletak pusat kota Sigli, sehingga masyarakat bisa dengan mudah pergi ke kota untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk menjual hasil usaha mereka.

Luas gampong benteng 24,9 hektare terdiri dari 2 dusun yaitu aman 1 dan aman 2, Berdasarkan data dari aparatur gampong tahun 2024, jumlah penduduk gampong Benteng sebanyak 1.436 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 314 KK. Keunikan Gampong Benteng terletak pada keberadaan asrama tentara, yang membuat sebagian penduduknya merupakan anggota TNI. Selain itu, sejumlah warga bekerja sebagai anggota Polri, pegawai negeri sipil (PNS), guru, dan tenaga kesehatan, baik di tingkat desa maupun di instansi pemerintahan di luar desa. Tak sedikit pula warga yang memiliki usaha di sektor UMKM, seperti warung sembako, penjual makanan, dan jasa. Sebagian warga lainnya bekerja sebagai buruh harian, pekerja bangunan, atau merantau ke luar daerah sebagai pekerja sektor informal.

Fasilitas umum di gampong Benteng cukup memadai untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di gampong ini terdapat satu sekolah PAUD, satu meunasah, satu balai pengajian, dan satu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Jalan utama desa sudah diaspal dan sebagian jalan dusun sudah diperkeras dengan rabat beton melalui program dana Desa.

Letak geografis Desa Benteng yang berada di pinggir pantai sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain mendukung pekerjaan dan kegiatan ekonomi, letak ini juga menjadi pertimbangan penting dalam program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, termasuk pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Visi dan Misi Gampong Benteng**

Visi gampong Benteng yaitu “Terwujudnya Gampong Benteng sebagai gampong yang mandiri berbasis perikanan, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gampong Benteng menetapkan 6 misi utama sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan desa:



- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian gampong seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas strategis lainnya.
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan agar masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi, dapat bekerja secara optimal, dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan memiliki daya saing.
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan sektor perikanan secara luas, termasuk industri, perdagangan, dan pariwisata.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*) yang menjunjung tinggi demokrasi, transparansi, penegakan hukum, keadilan, kesetaraan gender, dan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam agar tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

### **3. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 18 responden masyarakat gampong Benteng, diketahui bahwa pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat telah cukup dirasakan secara luas, walaupun masih terdapat berbagai tantangan. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya dana desa yang dikucurkan ke desa mereka, terutama sejak tahun 2015. Informasi tersebut diperoleh melalui aparat desa, sosialisasi masyarakat, dan media sosial. Sebagian besar masyarakat menyebut bahwa dalam proses perencanaan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat secara cukup aktif, terutama melalui musyawarah desa atau rapat-rapat dusun. Dari total responden, sekitar 12 orang menyatakan pernah menghadiri musyawarah desa yang membahas penggunaan dana desa. Salah satu warga mengatakan, Darmiyanti (32 Tahun) “Kami diundang dalam rapat dusun untuk memberi masukan program apa yang dibutuhkan, walaupun tidak semua usulan langsung disetujui.”

Terkait itu pak sekdes (Iskandar, 48) menjelaskan bahwa pada perencanaan pada musyawarah yaitu Musrembang Des, rembuk stunting, RPJMDes, RKPDes. Masyarakat yang di undang tidak menyeluruh melainkan hanya perwakilan masyarakat baik itu tuha peut, tuha lapan, tgg imum, keplor, dasawisma, PKK. Terkait usulan program disetujui berdasarkan regulasi yang di keluarkan dari pusat, dan anggaran yang sesuai. Program pemberdayaan yang telah dijalankan, masyarakat menyebut adanya kegiatan seperti pelatihan keterampilan (menjahit, pengelolaan UMKM, pembuatan sirih, pembuatan sayur dan buah ukir). Sebanyak 10 responden mengaku pernah mengikuti salah satu program tersebut, terutama pelatihan menjahit. Warga yang berpartisipasi menyebut bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat. Seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha kue menyampaikan, Marlinda (53) : “Saya mendapat bantuan mesin jahit, sehingga saya dapat menjalankan usaha dan membantu perekonomian keluarga”

Dalam hal kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, sebagian besar responden menilai bahwa program yang dilaksanakan cukup sesuai, meskipun masih ada catatan mengenai kurangnya pemerataan dan komunikasi. Sekitar 5 responden menyebutkan bahwa masih ada warga yang belum pernah ikut serta dalam program. Masyarakat berharap agar ke depan pendataan penerima program lebih merata dan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu. Terkait pelaksanaan program pemberdayaan, responden memberi penilaian cukup baik, walaupun tidak lepas dari kendala. Kendala yang sering disebutkan meliputi keterlambatan dana, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pelatihan lanjutan. Seorang tokoh masyarakat menyebutkan, “Programnya bagus, tapi sering kali terlambat cair, jadi pelatihan atau bantuannya mundur.”(Marlina, 58)

Secara umum, masyarakat menyampaikan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di gampong Benteng sudah berada di jalur yang benar, namun masih membutuhkan peningkatan dalam hal transparansi, pemerataan, serta evaluasi berkelanjutan. Harapan warga adalah agar program-program tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara lebih luas.

#### **4. Dampak Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Ekonomi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di gampong Benteng telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa program-program pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi keluarga. Beberapa warga mengungkapkan bahwa pelatihan keterampilan seperti menjahit, pengelolaan UMKM, pembuatan sirih, pembuatan sayur dan buah ukir pembuatan kerajinan tangan telah membantu mereka membuka peluang usaha mandiri. Salah satu warga, Ibu Eva Mutia (32 tahun), menyampaikan: “Saya ikut pembuatan sayur dan buah ukir yang diadakan dari dana desa tahun lalu. Sekarang saya sudah bisa menerima pesanan dari tetangga dan teman-teman. Lumayan bisa bantu ekonomi keluarga.”

Di sisi lain, beberapa masyarakat mengapresiasi adanya pembukaan lapangan kerja melalui proyek padat karya seperti pembangunan jalan desa dan pembangunan umum lainnya. Proyek ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memberikan pekerjaan sementara bagi warga yang menganggur. “Saya ikut kerja saat bangun saluran air dan jalan. Meskipun hanya beberapa minggu, tapi cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Mirza Aifit (28 tahun), warga setempat. Namun, sebagian kecil masyarakat menilai bahwa manfaatnya belum merata. Beberapa warga belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau menerima bantuan modal. Seorang ibu rumah tangga menyampaikan: “Saya tahu ada program dana desa, tapi belum pernah ikut pelatihan. Mungkin belum merata ke semua warga. Harapan saya ke depan, semua bisa merasakan manfaatnya.” (Cut Nazia, 39)

Secara umum, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka mengalami peningkatan sejak adanya program-program dari dana desa. Hal ini juga

didukung oleh persepsi warga bahwa dana desa sebaiknya difokuskan lebih besar pada sektor pemberdayaan ekonomi daripada infrastruktur, karena hasilnya lebih berkelanjutan. Keuchik gampong Benteng mengungkapkan bahwa : “Dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya berupa modal usaha namun juga berupa penambahan makanan bergizi untuk pencegahan stunting, selain itu kita juga mempunyai BUMG yaitu sewa menyewa pelaminan, serta paud yang dimiliki oleh gampong Benteng sendiri, tentunya tenaga kerja yang di pakai yaitu masyarakat Benteng sehingga upah yang di dapatkan dapat membantu perekonomian keluarga, selain itu pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan juga sangat penting dan tentunya di rencanakan berdasarkan regulasi dari pusat ” ujar keuchik (Triko Irianes, 65 tahun).

Temuan ini memperlihatkan bahwa dana desa berperan penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, efektivitas pemanfaatan dana tersebut tetap perlu ditingkatkan melalui pemerataan program, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

#### **4. PEMBAHASAN**

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan program dinilai sudah cukup baik melalui Musrenbangdes dan musyawarah dusun, meskipun masih bersifat representatif. Putri dan Pratiwi (2021) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat di banyak desa di Indonesia masih belum inklusif. Nugroho (2021) menegaskan pentingnya pemetaan sosial dan ekonomi untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Maria Liliosa Coe Wea dkk. (2024) yang menemukan bahwa program dana desa membawa dampak positif, tetapi belum merata.

Pembahasan difokuskan pada analisis temuan lapangan mengenai pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi di gampong Benteng. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dari 18 responden masyarakat dengan teori-teori yang relevan dan kebijakan terkait dana desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya dana desa yang dikucurkan ke gampong Benteng sejak tahun 2015, bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Informasi mengenai dana desa sebagian besar diperoleh dari aparat desa, musyawarah desa, dan media sosial.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa cukup dilibatkan dalam proses perencanaan, meskipun tidak semua masyarakat hadir secara langsung. Pelibatan tersebut umumnya dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), rembuk stunting, penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Namun, pelibatan tersebut masih bersifat representatif, artinya hanya perwakilan masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tuha peut, dasawisma, dan PKK yang diundang secara langsung. Putri dan Pratiwi (2021: 101) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum sepenuhnya inklusif dan masih

didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga perlu strategi fasilitasi yang lebih baik dari pemerintah desa. Dana desa telah dimanfaatkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di gampong Benteng. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan menjahit, pengelolaan UMKM, produksi sirih kemasan, ukiran buah dan sayur, hingga kerajinan tangan. Selain pelatihan, dana desa juga digunakan untuk pengadaan alat produksi seperti mesin jahit yang langsung diterima oleh peserta program.

Sebanyak 10 dari 18 responden menyatakan pernah mengikuti pelatihan atau menerima bantuan dari program pemberdayaan. Salah satu responden, Marlinda (53), menyampaikan bahwa mesin jahit yang ia terima sangat membantu usahanya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan bantuan alat produksi telah memberikan dampak nyata. Namun demikian, ditemukan pula adanya keluhan dari warga yang belum pernah mengikuti pelatihan atau merasa tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam distribusi manfaat program. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan ulang dan pembaruan mekanisme seleksi agar lebih inklusif dan merata.

Pemanfaatan dana desa di gampong Benteng memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan bahwa adanya pelatihan keterampilan telah membantu mereka membuka atau mengembangkan usaha rumahan. Beberapa warga, seperti Eva Mutia (32), menyatakan bahwa pelatihan ukir buah yang diikutinya membuka peluang untuk menerima pesanan dari tetangga dan teman, sehingga menambah penghasilan keluarga. Selain itu, pelaksanaan proyek padat karya seperti pembangunan jalan juga memberikan pekerjaan sementara bagi warga, seperti diungkapkan Mirza Aifit (28), yang mengaku penghasilannya terbantu saat bekerja dalam proyek tersebut.

Menurut keuchik Triko Irianes, dana desa juga digunakan untuk mendukung program pencegahan stunting melalui penyediaan makanan bergizi, pendidikan yang di dukung oleh desa yaitu PAUD. Selain itu, gampong Benteng juga memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang bergerak di bidang penyewaan pelaminan. Usaha tersebut menyerap tenaga kerja lokal, sehingga turut meningkatkan perekonomian warga. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Meskipun manfaat dari dana desa cukup dirasakan, terdapat beberapa kendala yang disampaikan masyarakat. Kendala tersebut antara lain adalah keterlambatan pencairan dana, lemahnya pengawasan program, dan kurangnya pelatihan lanjutan. Salah satu tokoh masyarakat, Marlina (58), menyatakan bahwa keterlambatan pencairan menyebabkan penundaan pelaksanaan pelatihan dan program lainnya. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pemerintah desa dalam aspek manajemen keuangan dan pelaporan. Selain itu,

partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan cukup sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya dalam meningkatkan keterampilan dan peluang usaha. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa belum dilibatkan, sehingga menimbulkan kesan bahwa program hanya menysasar kelompok tertentu. Nugroho (2021: 135) dalam kajiannya terhadap implementasi dana desa menyebut bahwa pemberdayaan yang efektif harus berbasis pada pemetaan sosial dan ekonomi warga, serta perencanaan partisipatif yang berkelanjutan, tidak hanya menjangkau kelompok dominan tetapi juga memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan penganggur.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan yang menyeluruh, desa perlu memperbaiki sistem pendataan warga, pemetaan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan bahwa proses seleksi dan pelaksanaan program dilakukan secara inklusif dan transparan. Pemberdayaan sejati tidak hanya terjadi ketika masyarakat dilibatkan dalam rapat, tetapi ketika mereka memiliki posisi tawar, informasi, dan akses untuk menentukan arah pembangunan secara setara.

Pemanfaatan dana desa di Gampong Benteng telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha telah menciptakan dampak positif, baik secara individu maupun komunitas. Namun, agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan, masih dibutuhkan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi partisipatif dari masyarakat secara luas.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Maria Liliosa Coe Wea dkk (2024) di Desa Wolowea Timur, yang menyimpulkan bahwa dana desa mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatannya belum merata karena keterbatasan pemerataan program dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Ini sejalan dengan kondisi di Gampong Benteng, di mana sebagian masyarakat belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang ada.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat gampong Benteng serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat  
dana desa di gampong Benteng telah dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan menjahit, pengelolaan UMKM, pembuatan kerajinan tangan, serta kegiatan padat karya. Pemerintah desa juga melibatkan

masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah desa, meskipun masih bersifat perwakilan. Partisipasi masyarakat dalam program ini cukup aktif, namun belum merata kepada seluruh warga. Beberapa warga menyatakan belum pernah mendapat kesempatan ikut serta, sehingga diperlukan pemerataan dan transparansi yang lebih baik dalam pendataan dan seleksi peserta program.

**2. Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi**

Program pemberdayaan yang didanai dari dana desa telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi warga. Sebagian besar responden merasakan adanya peningkatan pendapatan melalui kegiatan usaha baru maupun dukungan modal dan pelatihan. Selain itu, pelaksanaan proyek padat karya memberikan lapangan kerja sementara bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dana desa juga mendukung pengembangan BUMG, PAUD desa, dan program pencegahan stunting yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pelatihan lanjutan, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

**b. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

**1. Bagi Pemerintah Desa Benteng**

Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pendataan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan program dana desa agar semua lapisan masyarakat dapat ikut serta dan merasakan manfaatnya. Transparansi informasi, pemerataan peserta program, serta pelibatan masyarakat secara langsung perlu lebih ditingkatkan.

**2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan proaktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, baik dalam tahap musyawarah maupun dalam pelaksanaan program. Partisipasi yang aktif akan membantu memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

**3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat**

Disarankan agar pemerintah daerah dan pusat terus memberikan bimbingan teknis, pendampingan, dan pelatihan kapasitas aparatur desa agar program-program pemberdayaan yang dibiayai oleh dana desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Regulasi dan prosedur pencairan dana juga perlu disederhanakan agar pelaksanaan program tidak tertunda.

**4. Untuk Penelitian Selanjutnya**

Disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan cakupan responden yang lebih luas serta pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik hubungan antara pemanfaatan dana desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.



### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang telah memberikan izin dan dukungan penuh selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan dan masyarakat Gampong Benteng yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi secara terbuka. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Jabal Ghafur Sigli, khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi, atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyelesaian penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Desain penelitian dan penyelidikan kualitatif: Memilih di antara lima pendekatan* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Edi Suharto. (2018). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Cet. ke-4). Bandung: Refika Aditama.
- Halim, A., & Adiarto, A. (2021). Strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87–99
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Dalam *Revitalisasi dan pengelolaan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat* (hlm. 16). Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed., hlm. 33–34). SAGE Publications.
- Muhammad Bagus Setiadi. (2022). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 10(3), 881–894. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894>
- Nugroho, H. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa: Kajian inklusivitas dalam perencanaan pembangunan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 17(2), 135–148. <https://doi.org/10.24843/JPS.2021.v17.i2.p5>
- Putri Antou, V. A., Rumat, M. T. H. B., & Maramis, M. (2019). Efektivitas dana desa terhadap pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 133–140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25008>
- Rindi, T. A. (2019). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata* (Skripsi Sarjana). IAIN Metro.
- Riyadi, S., & Bratakusumah, D. S. (2020). Dana desa dan implementasi SDGs di tingkat lokal. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 45–60.
- Slamet, M. (2018). *Pembangunan desa dan dana desa: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pasal 1 ayat 2  
Vinet, L., & Zhedanov, A. (2019). A “missing” family of classical orthogonal polynomials.  
*Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–19.  
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>